

TUDI ISLAM

Vol. 1, No. 2, Juli - Desember 2013

Model Penafsiran Al-Qur'an M. Quraish Shihab
Karman

Menggagas Pendidikan Multikultural di IAIN Ambon
Abidin Wakano

Hadis-Hadis Tentang Sihir dalam Kitab Mu'tabar
Syafri Rasjidin

Respon Umat Islam terhadap Demokrasi
Basman

تطوير تعليم مهارة الكتابة
تجربة قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية والتعليم
جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية بجاكرتا
محب عبد الوهاب

**Kontesktualisasi Peran Mubalig dalam Pencegahan Cybercrime
(Upaya Memperbaiki Krisis Moral Bangsa di Dunia Maya)**
Syarifudin

PASCASARJANA IAIN AMBON

MENGGAGAS PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI IAIN AMBON

Oleh: Abidin Wakano

Dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Ambon dan Direktur *Ambon Reconciliation and Mediation Centre (ARMC)* IAIN Ambon, Email: abidin9022@yahoo.com

Abstract: Multicultural education in IAIN Ambon is one of an effort in transforming that institution as a civilization development instrument that has a vision of multiculturalism. This idea appears as a response to various social problems as a result of the conflict 1999-2003, as well as the social strategy of diversity in Maluku. There are three theories of pluricultural society (communal theory), namely: (1) the melting pot I: Anglo Conformity, (2) melting pot II: Ethnic Synthesis, and (3) cultural pluralism: Mosaic Analogy. From these theories, Of the three theories, the third theory is more democratic and relevant to the motto of Indonesia Bhineka Tunggal Ika. The implementation of multiculturalism education idea in IAIN Ambon needs human resources quality, dialogic of teaching and learning process, participatory between interpersonal ability of learners and educators.

Keywords: *Educational Multicultural in IAIN Ambon.*

Abstrak: Pendidikan multikultural di IAIN Ambon merupakan salah satu upaya untuk mentransformasikan lembaga tersebut sebagai instrumen pembangunan peradaban yang bervisi multikulturalisme. Gagasan ini muncul selain sebagai respon terhadap pelbagai problem sosial akibat konflik 1999-2003, juga sebagai strategi rekayasa sosial masyarakat Maluku yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi. Eksperimen tentang multikulturalisme, ditemukan tiga teori masyarakat majemuk (*communal theory*), yaitu: (1) melting pot I: Anglo Conformity, (2) melting pot II: Ethnic Synthesis, dan (3) cultural pluralism: Mosaic Analogy. Dari tiga teori ini, teori ketiga lebih demokratis dan relevan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Implementasi gagasan pendidikan multikulturalisme di IAIN Ambon membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang bervisi multikulturalisme dan memiliki strategi pembelajaran yang lebih dialogis, partisipatif—yang menumbuhkan kemampuan interpersonal pendidik dan peserta didik.

Kata Kunci: *Pendidikan Multikultural di IAIN Ambon.*

Pendahuluan

Realisme-sosiologi menunjukkan Indonesia merupakan salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Fakta ini berdasarkan data bahwa di Indonesia terdapat 665 bahasa daerah, 300 suku bangsa yang tersebar di 17.670 pulau besar dan kecil.¹ Dari realitas multikulturalisme Indonesia tersebut, Maluku menjadi salah satu provinsi yang memiliki tingkat keragaman yang tertinggi di Indonesia. Jumlah pulau di Maluku kurang lebih 1.412 buah, dua buah di antaranya yang besar itu Pulau Seram dan Pulau Buru.² Dari aspek budaya, masyarakat Maluku memiliki kurang lebih 50 kelompok suku bangsa dan sub-suku. Hal tersebut dapat dilihat dalam keberagaman bahasa (dialek), suku dan sub-suku di Maluku. Hasil penelitian *Summer Institute of Linguistik (SIL)* menyebutkan, bahasa di Maluku kurang lebih terdiri dari 117 buah. Suku dan sub-suku bangsa lebih dari 100 yang mendiami pulau-pulau kecil di kepulauan Maluku, yang terbentang dari utara sampai ke selatan.³ Teridentifikasi suku-suku bangsa di Maluku itu seperti orang Ambon, orang Seram, orang Kei, orang Buru, orang Lease. Di samping itu, ada juga orang Bugis, Makassar, Buton, atau Jawa dan sebagainya.⁴

¹www.infoplease.com/2004.

²Pemda Provinsi Maluku, *Maluku dalam Angka, 2003* (Ambon: BPS Provinsi Maluku, 2003), h. 3-6.

³Taber, Mark, dkk., *Atlas Bahasa Tanah Maluku* (Badan Pengkajian Masyarakat dan Pembangunan Universitas Pattimura dan Summer Institute of Linguistic Ambon, 1996).

⁴Suku bangsa di Maluku seperti etnis Buton, Bugis, Makassar, Jawa atau etnis lain biasa disebut sebagai orang dagang atau pendatang, sedangkan etnis yang dikategorikan adat seperti etnis Ambon, Seram, Lease, Tenggara, Buru adalah etnis asli yang mendiami pulau-pulau di Maluku, yang umumnya punya negeri serta bahasa tersendiri.

Tingkat keragaman yang ada merupakan anugerah Ilahi yang niscaya, dan menjadi modal sosial (*social capital*), dalam membangun masyarakat multikultural yang dinamis dan transformatif. Karena dalam masyarakat yang multikultural tersebut terdapat pelbagai khazanah dan kearifan lokal. Namun di sisi lain, secara sosiologis semakin tinggi tingkat keragaman suatu bangsa atau masyarakat, semakin tinggi dan kompleks pula masalah yang dihadapi. Menyadari dampak masyarakat yang multikultural seperti Indonesia ini, maka sejak awal pembentukan negara ini sudah dibangun suatu komitmen bersama yang tertuang dalam lambang negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini kemudian menjadi salah satu pilar utama dalam menyangga Indonesia yang multikultural. Dalam konteks Maluku, kesadaran untuk merawat keragaman yang ada sudah terbangun melalui suatu nilai dasar bersama orang Maluku sejak dahulu kala yang bersifat monodualistis, yaitu *Siwalima*, yang bermakna masyarakat Maluku itu walaupun terdiri dari kelompok *Siwa* dan *Lima*, tetapi tetap dianggap sebagai satu saudara, sebagaimana yang terdapat dalam spirit "*orang basudara*", (persaudaraan).

Permasalahannya kemudian, mengapa konflik dan kekerasan sering terjadi di Indonesia dan khususnya di Maluku?. Untuk menjawab permasalahan ini secara tuntas membutuhkan suatu penelitian dan kajian secara komprehensif tentang sumber-sumber konflik serta faktor pemicu konflik. Namun suatu hal yang pasti, realitas historis menunjukkan bahwa salah satu

Lihat J. Ajawaila, "Dinamika Budaya Orang Maluku", dalam *Maluku Menyambut Masa Depan* (Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, 2005), h. 159.

sumber konflik dan kekerasan yang sering mengitari masyarakat yang heterogen adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerima realitas multikulturalisme dan pluralisme yang ada. Bahkan dapat dikatakan bahwa fenomena konflik dan kekerasan yang makin meningkat dewasa ini merupakan salah satu indikator makin lemahnya kesadaran masyarakat untuk hidup dan menerima nilai-nilai multikulturalisme dan pluralisme tersebut. Sebaliknya yang berkembang adalah paham-paham eksklusivisme yang berbasis agama, etnis dan kampung (negeri/desa). Hal ini ditandai dengan makin berkembangnya paham-paham radikalisme agama dan primordialisme sempit suku dan kampung (negeri/desa).⁵

Sebagai masyarakat multikultur yang pernah mengalami konflik dan kekerasan sosial secara masif dan berkepanjangan, Maluku sangat membutuhkan peran pendidikan multikultural. Karena pendidikan merupakan salah satu instrumen transformasi peradaban yang sangat efektif. Konsep pendidikan multikultural merupakan salah satu konsep yang relevan untuk membangun perdamaian sejati di Maluku. Walaupun pendidikan multikultural ini masih merupakan konsep baru, bahkan secara nasional sebagai negara yang sangat multikultural di dunia, serta sejak dulu sudah memiliki salah satu pilar kebangsaan yaitu Bhineka Tunggal Ika, tetapi konsep Pendidikan multikultural (*multicultural education*) baru mulai digagas di Indonesia pada awal tahun 2000-an.

Pendidikan multikultural di Maluku mulai diwacanakan seiring

dengan upaya-upaya rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian di Maluku, khususnya di sekolah dan perguruan tinggi. Jika dilihat dari aspek historis, gagasan pendidikan multikultural di Maluku juga sama dengan latar belakang munculnya konsep pendidikan multikulturalisme ini di Eropa dan Amerika. Pendidikan multikultural merupakan pendidikan khas Eropa dan Amerika. Negara-negara seperti Canada, Jerman, Inggris dan Amerika Serikat merupakan contoh dari beberapa negara yang sudah menerapkan pendidikan multikultural. Pendidikan multicultural memiliki beberapa padanan dengan beberapa istilah berikut ini, yaitu: *intercultural education, interethnic education, trans-cultural education, multiethnic education, dan cross-cultural education*.⁶

Sejarah Pendidikan Multikulturalisme

Pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demokratis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Agar definisi ini bermanfaat diperlukan untuk mendefinisikan kembali budaya dan kebudayaan. Perumusan ini jelas tidak mudah karena perubahan-perubahan yang demikian cepat dan dramatis dalam kebudayaan itu, terutama karena globalisasi yang semakin meningkat. Menurut Tilaar yang dikutip Azra, pendidikan multikultural berawal dari perkembangan gagasan dan kesadaran tentang “interkulturalisme” seusai Perang Dunia II. Kemunculan gagasan dan kesadaran “interkulturalisme” ini

⁵Lembaga Antariman Maluku, *Penelitian, kekerasan dan Pembangunan Perdamaian Lintas Iman di Maluku*, 2011-2012.

⁶L.H. Ekstrand dalam Lawrence J. Saha, Ekstrand, L.H. *Multicultural Education, International Encyclopedia of the Sociology of Education*. (New York: Pergamon, 1997), h. 445.

selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dan kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara yang baru merdeka ke Amerika dan Eropa.⁷

Sejarah munculnya pendidikan multikulturalisme di negara-negara Eropa Barat dan Amerika, tidak bisa dipisahkan dari sejarah kelam rasisme di kedua bangsa tersebut. Gagasan pendidikan multikultural mulai diwacanakan pertama kali di Amerika dan negara-negara Eropa Barat pada tahun 1960-an oleh gerakan yang menuntut diperhatikannya hak-hak sipil (*civil right movement*). Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mengurangi praktik diskriminasi di tempat-tempat publik, di rumah, di tempat-tempat kerja, dan di lembaga-lembaga pendidikan, yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Realisme-historis menunjukkan bahwa masyarakat Amerika dan Eropa Barat dalam jangka waktu yang panjang terkonstruksi dalam sebuah kebudayaan tunggal, yaitu kebudayaan kulit putih yang Kristen. Padahal di Amerika Serikat misalnya bangsa aslinya adalah Indian. Fakta sebaliknya kelompok-kelompok lain seperti Indian dan Negro diposisikan sebagai kelompok minoritas, bahkan menjadi budak dengan pembatasan hak-hak mereka.⁸ Gerakan hak-hak

sipil ini, menurut James A. Bank berimplikasi pada dunia pendidikan, dengan munculnya beberapa tuntutan untuk melakukan reformasi kurikulum pendidikan yang sarat dengan diskriminasi. Pada awal tahun 1970-an muncullah sejumlah kursus dan program pendidikan yang menekankan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan etnik dan keragaman budaya (*cultural diversity*).⁹

Alasan lain yang melatarbelakangi adanya pendidikan multikultural ini keberadaan masyarakat dengan individu-individu yang beragam latar belakang bahasa dan kebangsaan (*nationality*), suku (*race or ethnicity*), agama (*religion*), gender, dan kelas sosial (*social class*). Keragaman latar belakang individu dalam masyarakat tersebut berimplikasi pada keragaman latar belakang peserta didik dalam suatu lembaga pendidikan.¹⁰

Bertolak dari pengalaman sejarah konflik Maluku masa lalu, serta pentingnya membangun masa depan Maluku yang lebih berkeadaba, maka menggagas Pendidikan Multikultural di IAIN Ambon menjadi penting, antara lain didasarkan pada tiga faktor. Pertama. Dalam visi IAIN Ambon, menekankan pada basis multikulturalisme yang meniscayakan perlunya reformasi dan transformasi kurikulum maupun paradigma civitas akademika IAIN Ambon, dari cara pandang eksklusif-konflikual, kepada cara pandang yang inklusif, pluralis, egaliter. Kedua. Masih minimnya perhatian terhadap pendidikan multikulturalisme Islam di IAIN

⁷Azyumardi Azra, "Pendidikan Multikultural: Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggal Ika" dalam *Tsaqafah: Membangun Budaya Cerdas Menjawab Tantangan Jawab*, Vol. 1, No. 2, 2003, h. 21.

⁸Parsudi Suparlan. *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, dalam Makalah yang diseminarkan pada Simposium Internasional ke-3, Jurnal Antropologi

Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli, 2002, h. 2-3.

⁹James A. Bank, (ed.) *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. (Boston-London: Allyn and Bacon Press, 1989), h. 4-5.

¹⁰*Ibid*, h. 14.

Ambon (khususnya di fakultas Tarbiyah dan ilmu keguruan), baik eksplisit maupun implisit. Ketiga. Realisme-sosial Indonesia dan khususnya Maluku sangat multikultural, dari segi suku, ras, bahasa, dan agama-hal ini berimplikasi kepada tingginya dinamika sosial masyarakat, baik menyangkut pengalaman integrasi maupun disintegrasi. Ketiga. IAIN Ambon diharapkan dapat menjadi pusat peradaban Islam di Maluku dalam menyemai nilai-nilai multikulturalisme Islam di Maluku, di Indonesia bahkan dunia. (Banyak pengamat dan peneliti dunia tertarik mau menjadikan Maluku sebagai laboratorium perdamaian dunia).

Untuk mengembangkan pendidikan multikultural di kampus para dosen dituntut menelaah secara kritis tentang materi dan bahan ajar yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran, agar tidak terjadi berbagai macam bias. Dalam kaitan ini, Sadker sebagaimana dikutip Donna M. Gollnick & Philip C. Chinn, mencatat adanya 6 (enam) macam bias dalam buku teks yang digunakan dalam pembelajaran. Keenam macam bias tersebut adalah: (a) bias yang tidak kelihatan (*invisibility*), (b) pemberian label (*stereotyping*), (c) selektivitas dan ketidakseimbangan (*selectivity and imbalance*), (d) tidak mengacu realitas (*unreality*), (e) pembagian dan isolasi (*fragmentation and isolation*), dan (f) bahasa (*language*).¹¹

Hasil penelitian Dian/Interfidei Yogyakarta terhadap para dosen dan guru agama di Yogyakarta, pada 2007, dalam penggunaan buku-buku teks umumnya, lebih menekankan

pembahasannya pada budaya-budaya mayoritas, sementara budaya-budaya minoritas sering diabaikan. Inilah yang disebut dengan bias tidak kelihatan (*invisibility*). Bias lain yang terdapat dalam buku-buku teks selama ini adalah adanya pemberian label kepada kelompok lain, baik positif atau negatif. Bias ini namanya stereotyping. Misalnya, orang Jawa dan Bugis itu ulet dan orang Ambon itu pemalas, atau orang Sarane itu bersih dan pintar sedangkan orang Salam itu kotor dan bodoh. Di aras lokal orang Seram belakang tanah da bodoh sedangkan orang Ambon dan Lease pintar, serta dalam konteks hubungan agama-agama “orang Kristen itu separatis RMS dan orang Islam itu teroris. Jika para dosen atau guru tidak menyadari bias (*invisibility*) seperti ini akan makin memperkeruh stigma-kolektif masa lalu.

Selain itu, buku-buku teks yang dijadikan pegangan pendidik biasanya menggunakan perspektif budaya mayoritas dan menafikan budaya minoritas. Inilah yang disebut bias *selectivity and imbalance*. Misalnya, buku-buku teks yang kita gunakan masih didominasi oleh budaya mayoritas. Tanpa sadar pendidikan yang kita kembangkan pun dominan menggunakan perspektif Jawa atau Sumatera. Kita sering memilih perspektif yang mayoritas, sementara perspektif lain diabaikan, padahal perspektif yang kita abaikan juga adalah bagian dari jati diri kita (identitas kultural). Dominasi budaya mayoritas ini berjalan seiring dengan univormalisasi budaya, dalam pelbagai aspek kehidupan. Pada sebagian buku ajar kita temukan penjelasan “makanan pokok orang Indonesia itu beras”. Padahal masyarakat Indonesia di beberapa provinsi lain pada juga punya kebiasaan pola makanan yang

¹¹Donna M. Gollnick & Philip C. Chinn, *Multicultural Education in a Pluralistik Society*, 1983, h. 299-300.

berbeda. Contoh dulu orang Madura punya makanan pokok adalah jagung, orang Maluku dan Papua punya makanan pokok sagu dan umbi-ubian. Tetapi penyeragaman makanan ini telah merusak struktur pangan masyarakat Madura, Maluku dan Papua menjadi beras. Contoh lain, di gaya bahasa di dalam dunia pendidikan mulai dikuasai oleh gaya bahasa artis atau selebriti yang populer di media, walaupun secara normatif itu bertentangan dengan kaedah bahasa—dan secara substansial juga bertentangan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Bias lain yang terdapat dalam buku teks adalah *unreality*. Maksudnya, buku teks yang dijadikan pegangan para pendidik tidak mengacu kepada data yang riil. Misalnya, buku teks Sejarah Indonesia pada masa Orde Baru banyak yang menginformasikan peristiwa dengan pelaku yang tidak sebenarnya. Dalam menjelaskan sejarah konflik Maluku pada 1999-2004 pun kita punya kecenderungan untuk memihak kepada diri atau kelompok sendiri dan menyalahkan kelompok lain, serta punya kecenderungan untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya, sehingga sejarah konflik Maluku ke pun bisa menjadi *unreality*.

Untuk mengurangi kecenderungan bias tersebut, kurikulum berbasis multikultural perlu memasukkan materi dan bahan ajar yang berorientasi pada penghargaan kepada orang lain. Dalam hubungan ini, James Lynch, merekomendasikan agar kampus/sekolah atau dosen/guru menyampaikan pokok-pokok bahasan multikultural, dengan berorientasi pada 2 (dua) tujuan, yaitu: (a) penghargaan kepada orang lain (*respect for others*), dan (b) penghargaan kepada diri sendiri

(*respect for self*). Kedua bentuk penghargaan ini, mencakup 3 (tiga) ranah pembelajaran (*domain of learning*). Ketiga ranah pembelajaran tersebut adalah: pengetahuan (*cognitive*), keterampilan (*psychomotor*), dan sikap (*affective*). Rekomendasi Lynch di atas mempertimbangkan hubungan yang kompleks antara dimensi intelektual dan emosional dalam perilaku siswa.¹² Hal ini juga relevan dengan empat pilar pendidikan UNESCO, yaitu:

1. *Learning how to know*
2. *Learning how to do*
3. *Learning how to be*
4. *Learning how to live together*

Selain itu kurikulum sebagai proses (*curriculum as process*) adalah “interaksi antara guru, siswa, dan pengetahuan di kelas. Atas dasar ini, semua yang terjadi dalam proses pembelajaran, dan semua yang dilakukan pendidik dan peserta didik di kelas adalah kurikulum. Kurikulum dengan model ini, menurut Lawrence Stenhouse sebagaimana yang kutip Smith menuntut 3 (tiga) langkah, yaitu: (a) perencanaan (*planning*), (b) telaah empirik (*empirical study*), dan (c) penilaian (*justification*).

Dalam tahap perencanaan harus memuat: prinsip seleksi isi, prinsip pengembangan strategi pembelajaran, prinsip pengambilan keputusan tentang urutan materi, dan prinsip mendiagnosis kasus-kasus yang terjadi. Sementara itu, dalam tahap telaah empirik harus memuat: prinsip penilaian terhadap kemajuan peserta didik, prinsip penilaian terhadap kemajuan pendidik, petunjuk praktis pelaksanaan kurikulum dalam berbagai konteks dan situasi, serta informasi

¹²James Lynch. *Multicultural Education: Principles and Practice*. (London: Routledge & Kegan Paul, 1986), h. 7-86.

tentang perubahan efek yang terjadi karena konteks yang berbeda. Selanjutnya, dalam tahap penilaian harus memuat formulasi tujuan kurikulum yang dapat diuji secara kritis.¹³

Tantangan Pengembangan Pendidikan Multikulturalisme di Maluku

Menghadapi dinamika masyarakat Maluku yang makin plural dan multikultural dewasa ini, maka IAIN sebagai salah satu instrumen transformasi budaya di Maluku diharapkan turut serta melakukan rekayasa sosial masyarakat Maluku melalui pendidikan yang berperspektif multikultural. Adapun tantangan yang menjadi alasan pentingnya menggagas pendidikan multikultural di IAIN Ambon, antara lain:

Pertama, segregasi sosial akibat konflik antar umat Islam dan Kristen di Maluku pada 1999-2003. Kondisi ini berakibat pada munculnya segregasi wilayah antar umat Islam dan Kristen serta segregasi pemikiran. Masyarakat kehilangan ruang-ruang perjumpaan secara informal di dalam masyarakat. Khususnya anak-anak dan mahasiswa—tidak memiliki memori kolektif tentang pengalaman hidup bersama, sebagaimana yang pernah dialami oleh orang tuanya. Sejarah segregasi pemukiman Muslim dan Kristen di Maluku sudah ada sejak dulu—dimana setiap negeri atau ohoi di Maluku tidak ada integrasi agama, sehingga muncul istilah negeri Islam atau negeri Kristen (negeri Salam dan negeri Sarane). Tapi kondisi sebelum konflik 1999, walaupun ada masalah, tetap dapat diterima dengan baik, sebagai suatu model kerukunan umat beragama, bahkan dalam relasi antar negeri Salam dan negeri Sarane ini

(negeri Islam dan negeri Kristen) secara kultural terdapat ikatan-ikatan persaudaraan yang begitu kuat—seperti pela, gandong dan larvul ngabal—yang berikutnya menjadi modal sosial-kultural dalam kehidupan bersama di Maluku. Pada saat konflik, ikatan-ikatan kultural seperti ini justru sangat efektif digunakan dalam membangun perdamaian di Maluku.

Namun hal itu berbeda dengan kondisi sosial pascakonflik 1999-2003, segregasi sekarang bukan saja terjadi di negeri-negeri (desa), tetapi juga terjadi di kota. Lebih ironis lagi segregasi sosial dewasa ini juga menyimpan stigma kolektif yang amat dalam. Selain itu komunikasi dan interaksi secara informal menjadi sangat minim, karena tidak ada lagi keluarga Islam dan Kristen hidup bertetangga. Dalam segregasi tersebut politisasi agama dan mobilisasi cepat sekali menimbulkan konflik.

Kedua. Berkembangnya politik identitas berdasarkan agama, suku dan kampung—yang sering diikuti oleh konflik dan kekerasan antar kelompok-kelompok tersebut. Tingginya konflik dan kekerasan antar kelompok masyarakat berbasis etnis dan kampung atau desa dewasa ini di Maluku, khususnya di kompleks kampus IAIN Ambon dewasa ini, mengindikasikan tingginya politik identitas di Maluku.

Politik Identitas – politisasi SARA untuk kepentingan ekonomi dan politik sering mempolarisasikan masyarakat menurut kelompok suku dan agama. Polarisasi seperti ini dapat menjadi potensi konflik di dalam masyarakat, apalagi dalam kondisi kehidupan masyarakat Islam dan Kristen yang hidup tersegregasi secara total pascakonflik dewasa ini. Politik identitas atau politisasi agama sangat rawan terhadap munculnya saling

¹³ Smith, Mark K, *Curriculum Theory and Practice*, 2002, h. 5-7

curiga dan hilangnya rasa saling percaya. Munculnya isu kristenisasi dan islamisasi sebagai alat provokasi kerap kali menjadi “Musuh Imajiner” di dalam kehidupan masyarakat Muslim dan Kristen. Efeknya persaudaraan di Maluku lebih dikondisikan pada persaudaraan dalam kepentingan politik, bukan persaudaraan sebagai orang Maluku, sebagai satu bangsa Indonesia atau persaudaraan sebagai sesama manusia ciptaan Ilahi.

Realisme-sosial menunjukan dewasa ini kita masih dihadapkan oleh pelbagai kekerasan akibat politik identitas serta menguatnya solidaritas eksklusif se-kampung, se-agama dan se-etnis dan makin melemahnya solidaritas yang lebih luas sebagai sesama masyarakat Maluku, sesama bangsa Indonesia dan sesama manusia ciptaan Ilahi. Fenomena maraknya konflik antar desa atau negeri dewasa serta konflik antar etnis serta idiologi pascakonflik 1999-2003 dewasa ini adalah contoh dari menguatnya politik identitas dan paham eksklusivisme tersebut. Dalam perspektif manajemen konflik setiap ada konflik selalu ada provokator, atau dalam domain politik disebut *entrepreneur* politik atau *entrepreneur* konflik. Para *entrepreneur* politik atau konflik senantiasa sengaja memelihara kondisi yang tidak stabil atau konflik untuk mencapai kepentingan pribadi atau kelompok, apatah lagi dalam kondisi masyarakat yang tersegregasi dewasa ini.

Ketiga. Kuatnya stigma-kolektif yang menjadi “musuh imajiner”, seperti “Kristen RMS vs Islam Teroris”, “Orang Ambon Lease Pintar vs Orang Seram Bodoh”, dan sebagainya. Stigmatisasi seperti ini dapat menimbulkan “*negative reference group* terhadap orang lain, serta menciptakan *in-group solidarity*

dan out group enmity. Hal ini juga punya dampak yang cukup kuat di kalangan mahasiswa. Keempat. Munculnya gerakan trans-nasional Islam, yang dewasa ini menjalar di pelbagai kampus-kampus di Indonesia, yang ingin menegaskan Islam Indonesia yang multikultural. Fenomena beragama seperti ini membuat sikap beragama menjadi kurang akomodatif terhadap budaya lokal. Munculnya gerakan trans-nasional agama, membuat agama-agama di Indonesia kehilangan akar kulturalnya. Misalnya arabisasi Islam vs westernisasi Kristen Indonesia. Fenomena trans nasional agama ini membuat agama-agama berada dalam posisi *vis a vis*.

Agama sebagai fenomena sosial – terdapat gerakan purifikasi yang mau membersihkan agama dari nilai-nilai yang dianggap bukan agama. Fenomena agama seperti ini merupakan sebuah problem bagi agama – agama di dalam menghadapi tantangan globalisasi dan akulturasi budaya. Gerakan purifikasi ini bersifat ambigu, sekan-akan mau mau melepaskan agama dari realitas kebudayaan, padahal itu sesuatu yang mustahil, karena agama itu bisa berdaya jika masuk ke ruang budaya. Karena manusia adalah makhluk kebudayaan.

Realitas sejarah membuktikan upaya purifikasi secara membabi buta telah mengakibatkan hancurnya budaya lokal masyarakat. Hilangnya bahasa lokal pada negeri-negeri (desa) Protestan di Maluku adalah salah satu contoh dari gerakan purifikasi yang dilakukan atas nama agama oleh kolonialisme Belanda, tetapi sebenarnya untuk kepentingan *divide et impera* kolonialisme Belanda dalam rangka penguasaan rempah-rempah di Maluku. Demikian halnya di negeri-

negeri Islam, gerakan puritanisasi yang berjumpa dengan modernisasi dan globalisasi dewasa ini secara gradual juga turut melemahkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat Muslim Maluku, termasuk bahasa.

Purifikasi agama pascakonflik dewasa ini turut membuat budaya lokal seperti *Pela, Gandong, Larvul Ngabal* dan 'Aini Ain kehilangan spirit dan konteksnya. Kalaupun perekat – perekat sosial seperti ini ada dan dilaksanakan oleh masyarakat, dianggap bukan urusan iman atau agama baik Islam maupun Kristen, melainkan urusan budaya yang bersifat keduniaan saja. Padahal peran perekat-perekat sosial tersebut – secara substansial sejalan dengan pesan-pesan universalitas semua agama. Gerakan purifikasi ini juga berdampak pada rusaknya relasi-relasi kultural, kebangsaan dan kemanusiaan serta menguatnya polarisasi masyarakat berdasarkan solidaritas agama secara eksklusif. Padahal sejatinya agama diturunkan untuk misi kemanusiaan, kedamaian serta kemaslahatan pembangunan secara luas. Agama mestinya dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan realitas masyarakat yang ada. Agama dalam konteks ini sangat terbuka dan akomodatif terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat.

Seorang cendekiawan Muslim dunia yaitu Mohammed Arkoun menegaskan, bahwa sebuah tradisi akan kering, mati, dan mandeg jika tidak dihidupkan secara terus-menerus melalui penafsiran ulang sejalan dengan dinamika sosial. (*Rethinking Islam*, 1999). Karena itu dalam rangka pembangunan yang berperspektif *peace and trust*, agama-agama dituntut perannya dalam menghadirkan pemahaman dan pola keagamaan yang

akomodatif, pro kemanusiaan dan kedamaian. Dalam perspektif Islam terdapat sebuah postulat yang berbunyi “Islam selalu sesuai dengan dengan setiap zaman dan tempat”, (*Al-Islam shalih likulli zaman wa al-makan*).

Kelima. Radikalisme agama (teroris), sedang menjalar di kampus-kampus, tak terkecuali kampus-kampus di Maluku juga bisa dimasuki. Proses pewarisan pengalaman traumatik dan stigma-kolektif akibat konflik dan kekerasan di masa lalu serta minimnya pemahaman dan kesadaran untuk menerima realitas multikulturalisme, membuat mahasiswa Maluku rentan terhadap masuknya gerakan fundamentalisme agama seperti itu. Berkembangnya fundamentalisme agama. Dalam perspektif modern fundamentalisme, seperti yang dikemukakan D'Adamo bahwa *Religion's Way of Knowing* jelas bisa menimbulkan masalah besar, khususnya jika satu agama berhadapan dengan agama lainnya. Masalah yang bisa timbul adalah “perang” klaim kebenaran (*truth claim*) dan selanjutnya perang klaim keselamatan (*salvation claim*). Sementara, dari sudut pandang sosiologis, secara faktual *claim of truth* dan *claim of salvation* ini telah menimbulkan pelbagai konflik sosial-politik serta perang antar agama. Konflik di Maluku dan Poso adalah salah satu contoh bahwa corak keagamaan yang eksklusif tersebut turut memberi kontribusi yang signifikan terhadap berkembangnya konflik.¹⁴

Keenam. Fenomena anarkisme di kalangan pelajar dan mahasiswa. Tawuran dan kekerasan di kalangan anak muda dewasa ini selain terjadi antar sekolah, antar fakultas

¹⁴Lihat Budhy Munawar-Rachman, “Berteologi dalam Konteks Agama-agama” dalam *Republika*, 22 Januari 1996.

dan antar perguruan tinggi, juga mulai bergeser ke pada ranah etno-religius

Ketujuh. Individualisme dan pragmatisme di kalangan anak muda. Tantangan neo - liberalisme dan kapitalisme yang ditandai dengan cara berfikir strukturalis dan pragmatis membuat relasi - relasi sosial yang bersifat kolegal terpinggirkan dan yang dominan adalah hubungan - hubungan yang lebih bersifat mekanistik. Bahkan jauh sebelumnya, kapitalisme kuno (VOC Belanda) telah mencabik-cabik hubungan orang basudara di Maluku, menciptakan segregasi sosial serta stigma-kolektif terhadap hubungan Islam dan Kristen di Maluku hingga saat ini. Apatah lagi fenomena neo - liberalisme dan kapitalisme sebagai realitas global dewasa ini tidak saja mendominasi bidang ekonomi, tetapi juga menkonstruksi cara hidup masyarakat dunia dengan pola hidup yang individualis, strukturalis dan pragmatis - sekaligus menghancurkan identitas masyarakat dunia, terutama negara - negara miskin. Masyarakat Maluku sebagai bagian dari komponen masyarakat dunia pun mendapatkan efek hegemoni neo - liberalisme dan kapitalisme tersebut. Tak pelak lagi atas nama modernisasi telah berakibat kepada proses pelemahan sejumlah *local wisdom* dalam budaya masyarakat Maluku seperti *Pela*, *Gandong*, *Larvul Ngabal*, dan *'Aini Ain* dan lainnya..

Kedelapan. Pembangunan masyarakat Maluku, khususnya di bidang pendidikan belum relevan dengan kosmologi dan antropologi masyarakat Maluku sebagai masyarakat kepulauan. Posisi modal sosial kultural masyarakat Maluku seperti *Pela*, *Gandong*, *Larvul Ngabal*, *Aini 'Ain* telah lama mengalami proses pelemahan, salah satunya melalui

kebijakan Orde Baru yang melakukan proyek penyeragaman sistem pemerintahan desa yang diadopsi dari budaya Jawa melalui UU No. 5/1979. Kebijakan ini telah berakibat pada hancurnya negeri-negeri adat. Padahal kearifan-kearifan lokal di Maluku seperti *Pela*, *Gandong*, *Larvul Ngabal*, dan *'Aini Ain* selama ini eksis bukan pada desa atau lurah, tetapi pada kategori-kategori inilah nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Maluku seperti *Pela*, *Gandong*, *Larvul Ngabal*, dan *'Aini Ain* menemukan spirit dan konteksnya. Bahkan UU No 5/1979 ini juga berakibat pada hancurnya tatanan ekonomi masyarakat adat. Sebagai contoh sagu yang dulu dikenal sebagai makanan pokok orang Maluku dan Papua tergantikan oleh nasi. Karena pengenalan sistem pemerintahan desa tersebut disertai dengan pengenalan nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Selain itu indikasi desa yang sejahtera secara ekonomi harus mampu menjadi desa swasembada beras.

Konsep Pendidikan Multikultural

Sebelum mengurai lebih jauh tentang pengembangan pendidikan multikulturalisme di IAIN Ambon, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tiga teori tentang masyarakat majemuk (*communal theory*), yaitu: (1) *Melting Pot I: Anglo Conformity*, (2) *Melting Pot II: Ethnic Synthesis*, dan (3) *Cultural Pluralism: Mosaic Analogy*. Ketiga teori tersebut populer dengan sebutan teori masyarakat majemuk (*communal theory*).¹⁵

¹⁵Gracia, Ricardo, *Teaching in a Pluristic Society: Concepts, Models, Strategies*. (New York: Harper & Row Publisher, 1982), h. 37-42.

Teori pertama, *Melting Pot I: Anglo Conformity*, berpandangan bahwa masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang beragam latar belakang—seperti agama, etnik, bahasa, dan budaya—harus disatukan ke dalam satu wadah yang paling dominan. Teori ini melihat individu dalam masyarakat secara hirarkis, yaitu kelompok mayoritas dan minoritas. Bila mayoritas individu dalam suatu masyarakat adalah pemeluk agama Islam, maka individu lain yang memeluk agama non-Islam harus melebur ke dalam Islam. Bila yang mendominasi suatu masyarakat adalah individu yang beretnik Jawa, maka individu lain yang beretnik non-Jawa harus mencair ke dalam etnik Jawa, dan demikian seterusnya. Teori ini hanya memberikan peluang kepada kelompok mayoritas untuk menunjukkan identitasnya. Sebaliknya, kelompok minoritas sama sekali tidak memperoleh hak untuk mengekspresikan identitasnya. Identitas di sini bisa berupa agama, etnik, bahasa, dan budaya. Teori ini tidak demokratis. Di Indonesia model seperti ini pernah dipraktikkan oleh rezim Orba, melalui penyeragaman budaya mengikuti budaya tertentu yang masih berpengaruh hingga saat ini. Bahkan muncul dalam regulasi, seperti penyeragaman sistem pemerintahan desa melalui UU No. 1979 Teori, penyeragaman makan pokok nasi dsb. Dalam konteks global Amerika Serikat menawarkan sebuah budaya global (*global village*).

Teori kedua, yaitu *Melting Pot II: Ethnic Synthesis*. Teori yang dipopulerkan oleh Israel Zangwill ini memandang bahwa individu-individu dalam suatu masyarakat yang beragam latar belakangnya, disatukan ke dalam satu wadah, dan selanjutnya membentuk wadah baru, dengan

memasukkan sebagian unsur budaya yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam masyarakat tersebut. Identitas agama, etnik, bahasa, dan budaya asli para anggotanya melebur menjadi identitas yang baru, sehingga identitas lamanya menjadi hilang. Bila dalam suatu masyarakat terdapat individu-individu yang beretnik Ambon, Madura, Dayak, Jawa, Sunda, dan Batak, atau secara lokal sub etnik Seram, Lease, Ambon, Kei, disatukan atau dilebur sehingga identitas asli mereka hilang, dan terbentuk identitas baru. Teori ini bisa berakibat kepada terjadinya genosida budaya—karena akan menghilangkan budaya identitas-identitas kultural yang ada dalam masyarakat.

Adapun teori ketiga, adalah: *Cultural Pluralism Mosaic Analogy*. Teori ini sangat demokratis, karena memandang semua masyarakat secara setara. Dia berpandangan bahwa masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang beragam latar belakang agama, etnik, bahasa, dan budaya, memiliki hak untuk mengekspresikan identitas budayanya secara demokratis. Teori ini sama sekali tidak meminggirkan identitas budaya tertentu, termasuk identitas budaya kelompok minoritas sekalipun. Bila dalam suatu masyarakat terdapat individu pemeluk agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu, bahkan agama suku sekalipun, tetap semuanya diberi hak dan peluang yang sama untuk mengekspresikan identitas keagamaannya masing-masing. Contoh yang lain, sejatinya di Indonesia yang terdiri dari pelbagai etnis seperti Ambon, Batak, Dayak, Madura, Jawa, Bugis, Makassar, semuanya berhak menunjukkan identitas budayanya, bahkan diizinkan untuk mengembangkannya. Masyarakat yang

menganut teori ini, terdiri dari individu yang sangat pluralistik, sehingga masing-masing identitas individu dan kelompok dapat hidup dan membentuk mosaik yang indah.

Untuk pengembangan pendidikan multikulturalisme di IAIN Ambon, teori ketiga tentang *Cultural pluralism Mosaic Analogy* relevan dengan konteks kehidupan sosial budaya masyarakat Maluku dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebab pengalaman historis membuktikan bahwa pembangunan masyarakat multikultur dengan paradigma *Melting Pot I: Anglo Conformity*, dan *Melting Pot II: Ethnic Synthesis*. Telah menuai sejumlah permasalahan sosial yang cukup pelik, berupa hancurnya identitas kultural dan modal sosial, hegemoni budaya dominan, serta konflik dan kekerasan yang tiada berakhir.

Pembelajaran Pendidikan Multikultural

Keberhasilan multikultural, secara metodik, tergantung dari manajemen pembelajaran yang diterapkan. Harry K. Wong, sebagaimana dikutip Linda Starr mendefinisikan manajemen pembelajaran sebagai praktek dan prosedur yang memungkinkan pendidik dan peserta didik belajar. Berkaitan dengan praktek dan prosedur ini, Ricardo L. Garcia menyebutkan 3 (tiga) faktor dalam manajemen pembelajaran, yaitu: (a) lingkungan fisik (*physical environment*), (b) lingkungan sosial (*human environment*), dan (c) gaya pengajaran pendidik (*teaching style*). Dalam pembelajaran peserta didik memerlukan lingkungan fisik dan sosial yang aman dan nyaman. Untuk menciptakan lingkungan fisik yang aman dan nyaman, guru dapat

mempertimbangkan aspek pencahayaan, warna, pengaturan meja dan kursi, tanaman, dan musik. Pendidik yang memiliki pemahaman terhadap latar belakang budaya peserta didiknya, akan menciptakan lingkungan fisik yang kondusif untuk belajar.¹⁶ Sementara itu, lingkungan sosial yang aman dan nyaman dapat diciptakan oleh pendidik melalui bahasa yang dipilih, hubungan simpatik antar peserta didik, dan perlakuan adil terhadap peserta didik yang beragam budayanya.¹⁷

Faktor lain, peserta didik, memerlukan gaya pengajaran pendidik yang menggembirakan. Garcia menegaskan, gaya pengajaran guru/dosen merupakan gaya kepemimpinan atau teknik pengawalan yang digunakan dosen/guru dalam proses pembelajaran (*the kind of leadership or governance techniques a teacher uses*). Dalam proses pembelajaran, gaya kepemimpinan pendidik berpengaruh terhadap peluang peserta didik untuk berbagi pendapat dan membuat keputusan. Gaya kepemimpinan pendidik terdiri dari gaya otoriter, demokratis, dan bebas (*laissez faire*). Gaya kepemimpinan otoriter tidak memberikan peluang kepada peserta didik untuk saling berbagi pendapat. Sebaliknya, gaya kepemimpinan dosen yang demokratis memberikan peluang kepada mahasiswa menentukan materi yang perlu dipelajari. Dosen yang menggunakan gaya kepemimpinan bebas (*laissez faire*) menyerahkan sepenuhnya kepada mahasiswa untuk

¹⁶Ricardo L. Garcia. *Teaching in a Pluristic Society: Concepts, Models, Strategies*, 1982, h. 146.

¹⁷Linda Starr. *Creating a Climate for Learning: Effective Classroom Management Technique*, dalam http://www.educationworld.com/a_curr/curr155.shtml, 2004, h. 4.

menentukan materi pembelajaran di kelas. Untuk kelas yang beragam latar belakang budaya (mahasiswa), lebih cocok dengan gaya kepemimpinan dosen yang demokratis.

Pendekatan demokratis ini, para pendidik dapat menggunakan beragam strategi pembelajaran, seperti dialog, simulasi, bermain peran, observasi, dan penanganan kasus. Sebagai contoh dosen mendiskusikan tentang keanekaragaman budaya serta sumbangan aneka budaya dan orang dari suku lain dalam hidup bersama sebagai satu bangsa "Orang Basudara". Untuk membangun rasa kebersamaan dialog juga diarahkan untuk mendiskusikan bahwa semua orang dari budaya apa pun ternyata membutuhkan dan menggunakan hasil kerja orang lain dan dari budaya atau agama lain. Adapun melalui simulasi dan bermain peran, para siswa difasilitasi untuk memerankan diri sebagai orang-orang yang memiliki agama, budaya, dan etnik tertentu dalam pergaulan sehari-hari. Dalam momen-momen tertentu, diadakan program dan kepanitiaan bersama, dengan melibatkan mahasiswa dari pelbagai latar belakang etnik, budaya, dan bahasa, bahkan agama. Sedangkan melalui observasi dan penanganan kasus, mahasiswa dan dosen difasilitasi untuk tinggal beberapa hari di masyarakat multikultural dalam program *live in*. Mereka diminta untuk mengamati proses sosial yang terjadi di antara individu dan kelompok yang ada, sekaligus untuk melakukan mediasi bila ada konflik di antara mereka.¹⁸ Dalam konteks Maluku ini menjadi sangat penting untuk proses integrasi masyarakat yang

tersegregasi, meminimalisir stereotif dan prasangka serta memperkuat rasa saling percaya dan saling membanggakan (pro-eksistensi).

Strategi pembelajaran yang berperspektif multikultural tersebut para mahasiswa/siswa diasumsikan akan memiliki wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang adanya keragaman dalam kehidupan sosial. Bahkan, mereka akan memiliki pengalaman nyata untuk melibatkan diri dalam mempraktikkan nilai-nilai dari pendidikan multikultural dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku yang toleran, simpatik, dan empati pun pada gilirannya akan tumbuh pada diri masing-masing siswa. Dengan demikian, proses pembelajaran yang difasilitasi dosen tidak sekadar berorientasi pada ranah kognitif, melainkan pada ranah afektif dan psikomotorik.

Menggunakan pendekatan demokratis dalam pembelajaran ini menuntut dosen/guru memiliki kompetensi multikultural. Farid Elashmawi dan Philip P. Harris menawarkan 6 (enam) kompetensi multikultural pendidik, yaitu: (a) memiliki nilai dan hubungan sosial yang luas, (b) terbuka dan fleksibel dalam mengelola keragaman mahasiswa/siswa, (c) siap menerima perbedaan disiplin ilmu, latar belakang, ras, dan gender; (d) memfasilitasi pendaftar baru peserta didik yang minoritas, (e) mau berkolaborasi dan koalisi dengan pihak mana pun, dan (f) berorientasi pada program dan masa depan¹⁹. Selain itu, James A. Bank menambahkan kompetensi multikultural lain yang harus dimiliki oleh pendidik, yaitu: (a)

¹⁸Abdullah Aly. "Menggagas Pendidikan Islam Multikultural di Indonesia", dalam *Jurnal Ishraqi*, Volume II Nomor 1, Januari-Juli 2003.

¹⁹Farid Elashmawi dan Philip P. Harris. *Multicultural Management: New Skills for Global Success*. (Malaysia: S. Abdul Majeed & Co, 1994), h. 6-7.

sensitif terhadap perilaku etnik para peserta didik, (b) sensitif terhadap kemungkinan adanya kontroversi tentang materi ajar, dan (c) menggunakan teknik pembelajaran kelompok untuk mempromosikan integrasi etnik dalam pembelajaran.²⁰

Simpulan

Konsep pendidikan multikultural merupakan salah satu konsep yang relevan untuk membangun perdamaian sejati di Maluku. Selain masyarakat Maluku memiliki pengalaman kelam ketika konflik 1999-2003, tetapi memiliki tantangan cukup besar dalam mengelola keragaman masyarakat Maluku. Hal itu didukung oleh faktor geografis, etnis, suku, bahasa, maupun agama. Ada tiga teori tentang masyarakat majemuk, (*communal theory*), yaitu: (1) *melting pot I: Anglo Conformity*, (2) *melting pot II: Ethnic Synthesis*, dan (3) *cultural pluralism: Mosaic Analogy*. Teori yang disebut terakhir lebih tepat untuk pengembangan pendidikan multikultural di IAIN Ambon karena lebih demokratis dan sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pengembangan pendidikan multikulturalisme membutuhkan pendidik yang demokratis, yang dapat menghargai keragaman peserta didiknya dan tidak terjadi bisa dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran pun akan menggunakan beragam strategi pembelajaran, seperti dialog, simulasi, bermain peran, observasi, penanganan kasus, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajawaila, "Dinamika Budaya Orang Maluku", dalam *Maluku Menyambut Masa Depan* (Ambon: Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, 2005).
- Aly, Abdullah: *Menggagas Pendidikan Islam Multikultural di Indonesia*, dalam *Jurnal Ishraqi*, Volume II Nomor 1, Januari-Juli 2003.
- A Bank, James. *Multicultural Education: Issues and Perspectives*, 1989.
- Bank, (ed.), James A.. *Multicultural Education: Issues and Perspectives*. Boston-London: Allyn and Bacon Press, 1989.
- Ekstrand, L.H dalam Lawrence J. Saha, Ekstrand, L.H. *Multicultural Education: International Encyclopedia of the Sociology of Education*. New York: Pergamon, 1997.
- Elashmawi, Farid dan Philip P. Harris. *Multicultural Management: New Skills for Global Success*. Malaysia: S. Abdul Majeed & Co, 1994.
- Gollnick, Donna M. & Philip C. Chinn, *Multicultural Education in a Pluralistik Society*, 1983.
- Lembaga Antar Iman Maluku, *Penelitian, kekerasan dan Pembangunan Perdamaian Lintas Iman di Maluku*, 2011-2012.
- Mark K, Smith. *Curriculum Theory and Practice*, 2002.
- Munawar Budhy-Rachman, "Berteologi dalam Konteks Agama-agama" *Republika*, 22 Januari 1996.
- Ricardo L, Gracia. *Teaching in a Pluristic Society: Concepts*,

²⁰James A Bank, *Multicultural Education: Issues and Perspectives*, 1989, h. 5 dan 104.

- Models, Strategies*. New York: Harper & Row Publisher, 1982.
- Starr, Linda. *Creating a Climate for Learning: Effective Classroom Management Technique*, dalam Suparlan, Parsudi. *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*, dalam Makalah yang diseminarkan pada Simposium Internasional ke-3, Jurnal Antropologi Indonesia, Denpasar Bali, 16-21 Juli, 2002.